

BAB I PENDAHULUAN

Sejak tahun 2007 Pemerintahan Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bermasyarakat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara yang melaksanakan CCT.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintahan melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam Klaster Pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan Pendidikan dan Kesejahteraan. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesejahteraan ibu. Dengan PKH diharapkan Peserta PKH (selanjutnya disebut Rumah Tangga/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial,

ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Sebagaimana kita ketahui, kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2020 yaitu 7,17% atau 366.770. Angka ini tentu masih perlu menjadi perhatian, mengingat terdapat 5 (lima) kabupaten yang angka kemiskinannya cukup tinggi yaitu antara 9,18 -12,04. Demikian juga angka pengangguran dan IPM, pada tahun 2020 angka pengangguran Provinsi Kalbar yaitu 5,81 atau meningkat 1,36 dari tahun 2019. Tahun 2020 IPM Kalbar berada pada 67,66 meningkat 0,01 dari tahun 2019 yaitu 67,65. Beberapa indikator di atas menjadi tantangan dalam pencapaian Misi 5 RPJMD 2023-2023 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera. Salah satu tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,00 di tahun 2023.

Beberapa indikator di atas menjadi tantangan dalam pencapaian Misi 5 RPJMD 2023-2023 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera. Salah satu tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,00 di tahun 2023.

Untuk mencapai tujuan tersebut di Kalimantan Barat telah didukung Sumber Daya Manusia PKH berupa 648 pendamping yang sebelumnya berjumlah 678, karena mereka lulus CPNS dan PPPK di berbagai instansi di Kalimantan Barat. Untuk melengkapi kekurangan ini maka kementerian RI melalui Direktur Jaminan Sosial telah menambahkan dari tenaga Korda Sembako/BPNT menjadi Pendamping PKH sebanyak 12 orang walaupun jumlah dimaksud masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah KPM PKH. Disamping itu juga di dukung 25 (APD) Administrator Pangkalan Data, Menurut informasi dari Kemensos bahwa APD ini kedepannya juga akan di tugaskan sebagai pendamping PKH. untuk mencukupi kekurangan pendamping dimaksud. Selanjutnya juga diperkuat dengan 14 Koordinator PKH Kab/kota, serta 2 Orang Koordinator wilayah PKH untuk menangani 179.527 KPM PKH yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah pusat/kementerian sosial RI tahun 2023 pada Tahap I telah mengalokasikan Bantuan Sosial Non Tunai kepada 169.425 KPM PKH sebanyak Rp. 122.771.150.000 (Seratus Dua Puluh dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dana sharing APBD dari 14 kabupaten/kota sebanyak Rp. 2.530.428.791 (Dua milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah) dana tersebut dinilai belum maksimal walau sudah ada peningkatan dari pada tahun 2023, untuk memenuhi himbauan Kementerian Sosial RI, bahwa setiap kabupaten kota minimal ada dana sharing sebesar 5%. Dana tersebut dinilai belum maksimal, untuk memenuhi himbauan Kementerian Sosial RI, bahwa setiap kabupaten kota minimal ada dana sharing sebesar 5%

Pemerintah pusat/kementerian sosial RI tahun 2023 pada Tahap I telah mengalokasikan Bantuan Sosial Non Tunai kepada 169.425 KPM PKH sebanyak Rp. 122.771.150.000 (Seratus Dua Puluh dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dana sharing APBD dari 14 kabupaten/kota sebanyak Rp. 2.530.428.791 (Dua milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah) dana tersebut dinilai belum maksimal walau sudah ada peningkatan dari pada tahun 2023, untuk memenuhi himbauan Kementerian Sosial RI, bahwa setiap kabupaten kota minimal ada dana sharing sebesar 5%. Dana tersebut dinilai belum maksimal, untuk memenuhi himbauan Kementerian Sosial RI, bahwa setiap kabupaten kota minimal ada dana sharing sebesar 5% Peningkatan Kapasitas SDM PKH merupakan Program Nasional dan bersifat lintas sektor melibatkan kementerian sosial sebagai pelaksana, kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian kesehatan sebagai penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, kementerian agama sebagai penyedia layanan pendidikan, bappeda sebagai perencana program daerah dan instansi pendukung lainnya seperti himbara (BRI, BNI Dan Bank Mandiri) sebagai lembaga penyalur bantuan. Hasil akhir dari Program PKH ini adalah sejauh mana Keluarga Penerima Manfaat itu bisa

mengikuti Program dengan baik sehingga dapat keluar dari kemiskinan dengan Graduasi Mandiri.

Program Keluarga Harapan merupakan Program Nasional dan bersifat lintas sektor melibatkan kementerian sosial sebagai pelaksana, kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian kesehatan sebagai penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, kementerian agama sebagai penyedia layanan pendidikan, bappeda sebagai perencana program daerah dan instansi pendukung lainnya seperti himbara (BRI, BNI Dan Bank Mandiri) sebagai lembaga penyalur bantuan.

Hasil akhir dari Program PKH ini adalah sejauh mana Keluarga Penerima Manfaat itu bisa mengikuti Program dengan baik sehingga dapat keluar dari kemiskinan dengan Graduasi Mandiri.

Salah satu Kegiatan Program Keluarga Harapan adalah melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, maka dibuatlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB III FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dilaksanakan kegiatan Administrasi dan koordinasi dengan pihak terkait yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi PKH Tingkat Provinsi yang terdiri dari pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dan membuat surat permohonan sebagai Narasumber kepada Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI dan Narasumber dari Provinsi serta surat undangan Peserta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

B. PELAKSANAAN

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan Rapat Koordinasi PKH tingkat Provinsi adalah untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi penyelenggara Program Keluarga Harapan, serta memantau pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Tingkat Provinsi sekaligus mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai perannya. Rapat pada kali ini mengambil tema **“Sinergitas Program Keluarga Harapan Menuju KPM Graduasi Mandiri Sejahtera”**,

- a. Tujuan
 - a) Terciptanya kesepahaman instansi terkait dalam mendukung kegiatan Program Keluarga Harapan di Provinsi.
 - b) Meningkatkan Koordinasi di tingkat Provinsi penyelenggara Program Keluarga Harapan, sehingga menjadi penguatan (reinforcement) antar instansi terkait sebagai dampak terselenggaranya Program Keluarga Harapan.
 - c) Terpecahkannya permasalahan-permasalahan yang di hadapi pada tingkat Kab/Kota pelaksana Program Keluarga Harapan sehingga program dapat berjalan dengan baik.

2. Dasar

- a. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 460/64/DINSOS Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 Nomor DPA/A.1/ 1.06.0.00.0. 00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023.
- b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan Tahun 2023.
- c. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 460/64/DINSOS tanggal 13 Februari 2023 Kegiatan Rapat Koordinasi PKH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

2. Tempat dan Waktu

Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai dengan 10 Maret 2023 bertempat di Kapuas Palace Hotel Jl. Budi Karya, Benua Melayu Darat Kota Pontianak.

3. Peserta

Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh 54 (Lima Puluh Empat) orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Peserta Kabupaten dari Dinas Sosial, Bappeda dan Koordinator Kabupaten Kota sebanyak 42 Orang
- b. Peserta Provinsi dari OPD terkait Bank Himbara, PT. Pos Cabang Pontianak sebanyak 12 Orang

4. Nara Sumber

Nara Sumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Provinsi, yaitu dari Kementerian Sosial RI sebanyak 1 (Satu) orang, Narasumber Provinsi sebanyak 3 (dua) orang yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Koordinator Wilayah Kalbar 1, dan Koordinator Regional Kalimantan.

6. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat adalah pada pelaksana PKH Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

7. Metode

Kegiatan Bimbingan Tersebut menggunakan metode :

- a. Penyampaian Materi
- b. Tanya Jawab
- c. Diskusi
- d. Diskusi Kelompok

8. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah meningkatkan koordinasi dan pemahaman tentang Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan di lapangan tentang ketentuan Program Keluarga Harapan, serta dapat teratasinya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Provinsi Kalimantan Barat. Selain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH di Provinsi Kalimantan Barat, dengan adanya Rapat Koordinasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan koordinasi di tingkat Provinsi sehingga terjadi penguatan (reinforcement) antar instansi terkait sebagai dampak terselenggaranya Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini dapat mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, serta merubah perilaku keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Penerima Manfaat yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan terutama kesejahteraan keluarga sangat miskin yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

A. FAKTOR PENDUKUNG

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat adanya Partisipasi aktif dari para peserta dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Nara sumber (Narasumber Pusat dan Narasumber Daerah/Provinsi), peserta baik Peserta Kabupaten maupun Provinsi dan penanggungjawab kegiatan.

B. FAKTOR PENGHAMBAT

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Provinsi pada prinsipnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri tidak mengalami hambatan sama sekali, hanya saja hambatan tersebut dapat diatasi dan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam Rapat Koordinasi ini dapat kita ketahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masing-masing Dinas/Instansi Kabupaten/Kota pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PKH. Dengan adanya kegiatan Rapat Koordinasi ini kita dapat mendiskusikan dan mencari jalan keluar atau solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut sehingga kegiatan Program Keluarga Harpan di Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan dan tepat sasaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Provinsi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 telah dilaksanakan dengan lancar, bersama ini dapat kami simpulkan bahwa :

1. Data yang digunakan sekarang untuk semua bantuan sosial bersumber dari DTKS oleh sebab itu jika ada penduduk miskin namun tidak tercover bantuan sosial mohon dicek DTKS kemungkinan belum masuk DTKS dan juga PKH bantuan bersyarat apakah penduduk miskin tersebut memenuhi syarat komponen PKH.
2. Peran Bappeda Provinsi dalam mendukung pelaksanaan PKH di daerah adalah mendorong masing-masing daerah untuk menganggarkan dana sharing sesuai dengan aturan program 5% namun kendala daerah adalah ketersediaan anggaran yang tidak bisa bappeda provinsi intervensi demikian juga bappeda provinsi berkomitmen mendukung kab/kota untuk mengupdate data DTKS melalui SIKS-NG agar database penerima manfaat lebih valid dan akurat sejalan dengan pertanyaan Kadis Kayong Utara bahwa banyak yang belum tercover bantuan sosial oleh sebab itu perlu peran pemerintah daerah dalam menangani data miskin sesuai alur yang ditetapkan. SDM PKH sudah memiliki ilmu melalui diklat stunting dimasing-masing daerah agar bekerjasama dengan tim penanganan stunting tingkat kab/kota demikian juga dengan program-program daerah dimasing-masing dinas dapat diakses oleh Penerima Program PKH tentu melalui dukungan dinas sosial mengkomunikasikan.

3. Validasi by sistem sebenarnya sudah sangat valid untuk mengatasi kekurangan KPM akibat dari data KPM yang tidak valid baik itu berbasis nik maupun hal lainnya, yang dimaksud validasi by sistem ini sudah melalui pengecekan yang sangat ketat baik itu NIK/NOKK, Padan Dapodik, Rekening aktif dan kriteria PKH semua sudah terpenuhi melalui SIKS-NG sementara KPM yang tidak masuk di SP2D termasuk KPM yang belum valid dan memiliki masalah baik itu nik atau apapun yang belum padan di DTKS KPM yang di gantikan validasi by sistem.
4. Penyetaraan jabatan sementara waktu untuk APD memang akan dilaksanakan tahun ini, dengan pertimbangan semua data sudah dikelola oleh Pusdatin melalui SIKS-NG dan PKH hanya pengguna data saja kedepannya segala yang menjadi tugas APD sudah tercover by sistem kelak diaplikasi yang di sebut SIKS-PKH jadi tugas yang biasa tuppoksi APD sudah tidak ada sehingga semua APD akan di jadikan pendamping sosial PKH. Sementara waktu hanya APD untuk koordinator belum ada pengkajian penyetaraan jabatan.
5. KKS burekol baru sedang proses jika sudah berhasil burekol sesuai hasil pengecekan lapangan maka akan di distribusikan himbara ke masing-masing daerah, kondisu sekarang tinggal menunggu. KPM blokir akan di burekolkan jika nomor rekening berubah dan di sesuaikan dengan NIK yang dilaporkan oleh SDM PKH Hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendokumentasikan KTP KPM sebelumnya.
6. SK nomor 469/3.4/KP.03/4/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tujukan kepada Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota itu sudah resmi, jika memang ada nama Eks Korda yang sudah resign masih tercantum maka akan di buat SK Revisi yang akan di kukuhkan kembali,

seharusnya sudah bisa digunakan untuk melaporkan diri ke dinas sosial agar dibuatkan SPT hal tersebutakan menjadi penilaian terkait kelayakan eks korda menjadi SDM PKH ke depannya

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah masing-masing kabupaten/kota mendukung pemutakhiran data melalui SIKS-NG sesuai alur setiap bulan supaya mendapatkan DTKS yang valid digunakan untuk data bantuan sosial setiap tahap menggunakan data update merupakan solusi terhadap pemahaman bahwa bantuan sosial tidak tepat sasaran.
2. Bappeda Provinsi mendorong Bappeda Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan PKH di daerah melalui penganggaran dana sharing, Dukungan Program yang terkait dan pemberdayaan SDM terutama terkait stunting.
3. Kementerian Sosial di harapkan dapat memberikan informasi kepada Daerah terkait perubahan SOTK yang berdampak pada Program Sembako yang dahulu ditangani bidang PFM sekarang dibidang mana dan Terkait Eks Korda agar diberikan informasi kepada daerah proses peralihan menjadi SDM PKH apakah tugas melekat dengan tugas pendamping atau tetap mengurus sembako.

BAB V PENUTUP

Demikian laporan ini kami susun semoga bermanfaat guna memberikan pengetahuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai bahan masukan dan dokumentasi serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya laporan ini maka proses kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan di masa yang akan datang dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Pontianak, 13 Maret 2023
Pelaksana Kegiatan PKH Tahun 2023

HARYANTO, S.ST. M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19650613 199010 1 001

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pejabat PPTK Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial

SYARIE MUSSADIQ, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19710715 199803 1 008

TATIK GESTYANINGSIH, A.KS.M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19680514 198901 2 002

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023



Peserta sedang mengikuti kegiatan Penjelasan Teknis Rakor PKH Tahun 2023



Peserta sedang mengikuti kegiatan Penjelasan Teknis Rakor PKH Tahun 2023



Pembacaan Doa oleh Petugas Pada saat pembukaan Rakor PKH Tahun 2023



**Peserta Rakor PKH sedang menyanyikan Lagu Indonesi Raya
Pada saat pembukaan Rakor PKH Tahun 2023**



**Peserta Rakor PKH sedang melakukan Yel Yel PKH
Pada saat pembukaan Rakor PKH Tahun 2023**



**Laporan Panitia Penyelenggara
Pada saat pembukaan Rakor PKH Tahun 2023**



Kepala Dinas Sosial Menyampaikan Arahan sekaligus membuka acara rakor PKH tahun 2023



Kepala Dinas Sosial Menyampaikan materi pada saat rakor PKH tahun 2023



Bersama Kepala Dinas Sosial Kota Singkawang pada saat Pembukaan rakor PKH Tingkat Provinsi tahun 2023



Peserta Rakor PKH Tingkat Provinsi tahun 2023



Salah satu Narsum Menyampaikan materi didepan peserta Rakor PKH Tingkat Provinsi Kalbar 2023



Peserta Rakor PKH Tingkat Provinsi Kalbar 2023